

PROSES VERBAL

1. Hal : MRI Inspektorat Jenderal Tahun 2025
2. Unit Konseptor
 - a. Eselon III : Koordinator Perencanaan
 - b. Eselon II : Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Dasar Pembuatan
 - a. Surat Tugas :
 - b. Uraian : MRI Inspektorat Jenderal Tahun 2025
 - c. Tgl. Diterima : 24-04-2025

No	Keterangan	Nama	Tanggal	TTD
1	Diketik dan diserahkan oleh	R. NOERMIENDARI, SE,AK.M.AK	24-04-2025	
2	Direviu dan disetujui Koordinator Perencanaan	R. NOERMIENDARI, SE,AK.M.AK	24-04-2025	✓
3	Direviu dan disetujui Sekretaris Inspektorat Jenderal	TIN LATIFAH, SP, M.SI		

Tanggal	Catatan
24-04-2025	Pengajuan revidi verbal oleh R. Noermiendari, SE,Ak.M.Ak
24-04-2025	Verbal telah disetujui oleh R. Noermiendari, SE,Ak.M.Ak

Jakarta, 24 April 2025

Yang Menyetujui
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Tin Latifah, SP, M.Si
197409181999032002

Yang Mengusulkan
Penanggung Jawab



R. NOERMIENDARI, SE,AK.M.AK
197601052002122002



MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) 2025

Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Manajemen Risiko Indeks (MRI) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Manajemen Risiko Indeks ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat Jenderal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan Manajemen Risiko Indeks yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis risiko.

Melalui penyusunan MRI ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat maturitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Hasil dari pengukuran ini diharapkan tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi acuan strategis dalam peningkatan kinerja dan penguatan pengendalian intern.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk data, informasi, maupun masukan selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pertanian.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pt. Inspektur Jenderal,



Tia Latifah, SP, M. Si

NIP. 19740918 199903 2 002 B

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Format 1.....	3
Penetapan Konteks Manajemen Risiko	
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.....	3
Format 2.....	7
Kriteria Kemungkinan Dan Dampak Terjadinya Risiko.....	7
Format 3.....	10
Matriks Analisis Risiko.....	10
Format 4.....	11
Daftar Kode Risiko Dan Penyebab.....	11
Format 5.....	12
Identifikasi Risiko.....	12
Format 6.....	17
Analisis Risiko.....	17
Format 7.....	21
Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja.....	21
Format 8.....	22
Peta Risiko.....	22
Format 9.....	24
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis).....	24
Format 10.....	27
Rencana Tindak Pengendalian.....	27

FORMAT 1

PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Nama Pemilik Risiko : Tin Latifah
 Jabatan Pemilik Risiko : Inspektur Jenderal
 Nama Koordinator Pengelola Risiko : R. Noermiendari
 Jabatan Koordinator Pengelola Risiko : Ketua Kelompok Perencanaan
 Periode Penerapan : 02 Januari s.d 31 Desember 2025

1. Hal-Hal Yang Dapat Mengancam Eksistensi Unit Pemilik Risiko

No.	Ancaman	Nama Konteks	Indikator
1	Pemahaman pegawai Itjen atas SPIP masih tergolong rendah	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	Persentasi Capaian Pelaksanaan RB lingkup Inspektorat Jenderal
	Strategi komunikasi dan sosialisasi atas penilaian wilayah Zona Integritas kurang efektif		
	Minimnya evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja.		
	Tidak adanya SOP yang jelas dalam menangani aduan. Situs atau aplikasi penanganan aduan di lingkup Kementerian Pertanian belum terpadu pada 1 (satu) situs/aplikasi		
	Perubahan kebijakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada realisasi IKU.		

No.	Ancaman	Nama Konteks	Indikator
	Reward bagi pegawai berprestasi belum ditetapkan dalam nyata.		
	Adanya persepsi negative responden SPI KPK dari dalam maupun luar (pegawai Kementerian, masyarakat pengguna layanan Kementerian Pertanian, Pihak Ketiga/Vendor Pengadaan Barang/Jasa, Eksper/Para Ahli)		
	Komitmen untuk tindak lanjut oleh Unit Kerja/Satker rendah, dan ketidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang telah tertuang di dalam LHA		
	Fungsi APIP Kementerian Pertanian belum dapat memberikan nilai tambah strategis		
2	Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan target per periodik (bulan) sebagaimana ditetapkan dalam DIPA	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

2. Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko

No.	Nama Konteks (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	Persentasi Capaian Pelaksanaan RB lingkup Kementerian Pertanian
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian

3. Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

No.	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Program
1	Melakukan 1) penyusunan Perencanaan Strategis Reformasi Birokrasi sesuai Road Map dan hasil evaluasi tahun sebelumnya; 2) penetapan dan integrasi rencana aksi; 3) implementasi program Reformasi Birokrasi sesuai rencana aksi; 4) monitoring berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi (triwulan) dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP; serta 5) pelaporan atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Inspektorat Jenderal untuk disampaikan ke Kementerian PAN-RB.	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Inspektorat Jenderal
2	Melakukan 1) penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja; 2) penyusunan DIPA; 3) melaksanakan anggaran; 4) melaksanakan pengadaan barang/jasa; 5) penyelesaian tagihan dan pembayaran; 6) monitoring dan evaluasi realisasi anggaran (monitoring deviasi Halaman III DIPA dan evaluasi kendala dalam pelaksanaan anggaran; 7) revisi dan penyesuaian anggaran; 8) pelaporan IKPA melalui aplikasi OM-SPAN; serta 9) tindak lanjut hasil evaluasi IKPA.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

4. Daftar Pemangku Kepentingan

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	Internal
2.	Satker Daerah lingkup Kementerian Pertanian	Eksternal
3.	BPK-RI	Eksternal
4.	BPKP	Eksternal
5.	KPK	Eksternal

5. Selera Risiko

Selera risiko ditetapkan pada level sedang (3). Selera Risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas/Menteri Pertanian.

Disusun oleh :
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Tanggal : Januari 2025



Tin Latifah, S.P., M.Si.
NIP.197409181999032002

Disetujui oleh :
Plt. Inspektur Jenderal

Tanggal : Januari 2025



Tin Latifah, S.P., M.Si.
NIP.197409181999032002

FORMAT 2

KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA RISIKO

1. Kriteria Kemungkinan

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Presentase dalam 1 tahun	Jumlah Frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0\% < x \leq 5\%$	Sangat jarang : < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terkahir
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang : 2 kali s.d 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terkahir
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering : 6 kali s.d 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terkahir
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering : 10 kali s.d 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terkahir
Hampir pasti terjadi (5)	$50\% < x \leq 100\%$	Sangat sering : > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terkahir

2. Kriteria Dampak

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan	≤ 0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku (<i>stakeholder</i>) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku (<i>stakeholder</i>) 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku (<i>stakeholder</i>) > 20	Pemberitaan negatif di media local	Pemberitaan negative di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media social yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media social menjadi treding topik nasional dan atau internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan fisik ringan bekerja pada hari yang sama	Gangguan Kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau	Kejadian fatal/kematian

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
				tugas) > 1 hari s.d 3 minggu	mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU ≥ 97%	97% > Capaian IKU ≥ 92%	92% > Capaian IKU ≥ 87%	87% > Capaian IKU ≥ 80%	80% > Capaian IKU ≥ 70%
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s.d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan > 0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan > 1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

FORMAT 3

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

FORMAT 4

DAFTAR KODE RISIKO DAN PENYEBAB

1. Kode Risiko

No	Uraian Kode	Penjelasan	Keterangan
1	Pemilik Risiko (Inspektur Jenderal) H	Menunjukkan Unit Kerja Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko	H untuk Inspektorat Jenderal sesuai Permentan Nomor 02 Tahun 2025
2	Kategori Risiko	Menunjukkan jenis risiko yang dikalsifikasi berdasarkan aktivitas, bukanlah dampak risiko. Masing-masing kategori risiko dapat dimasukkan ke dalam lingkup risiko strategis instansi/ risiko strategis unit kerja/ risiko operasional unit kerja	- 1 → Risiko Bencana - 2 → Risiko Kebijakan - 3 → Risiko Kecurangan - 4 → Risiko Kepatuhan - 5 → Risiko Operasional - 6 → Risiko Pemangku Kepentingan
3	Nomor Urut Risiko	Menunjukkan nomor urut risiko dalam bagan risiko Inspektorat Jenderal	- 1 → nomor urut pertama - 2 → nomor urut yang kedua - dst

2. Kode Penyebab

- Orang (Man) : MN
- Dana (Money) : MY
- Metode (Method) : MD
- Bahan (Material) : MR
- Mesin (Machine) : MC
- Eksternal : EX

FORMAT 5

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal
Tahun : 2025

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP	Pemilik Risiko	Unit Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	Persentasi Capaian Pelaksanaan RB lingkup Kementerian Pertanian dengan target 80,55%	H.5.1.MN.1	Rendahnya komitmen dan partisipasi unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan RB	Risiko Operasional	Tidak tercapainya target reformasi organisasi, dan reputasi organisasi menurun	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, Sekretariat
				H.5.2.MN.2	Rendahnya pemahaman pegawai Inspektorat Jenderal terhadap substansi dan	Risiko Operasional	- Pelaksanaan RB hanya bersifat administrative - Perubahan budaya kerja sulit terwujud	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, Sekretariat

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP	Pemilik Risiko	Unit Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					urgensi pelaksanaan RB		- Inovasi layanan publik rendah			
				H.1.1.MN.1	Ketidaksesuaian antara perencanaan RB dengan implementasi RB oleh seluruh Unit Kerja	Risiko Kebijakan	Terjadi ketidak sinkronya antara program RB yang telah ditetapkan di pusat dengan program RB yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di bawah nya.	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, Sekretariat
			Tersusunnya Laporan Hasil Audit pada Satker lingkup mitra kerja Inspektorat sebanyak 50 laporan	H.5.3.MN.3	Laporan Hasil Audit yang disusun bukan diperoleh dari Audit Ketaatan atau Audit Kinerja	Risiko Operasional	Tidak tercapainya Laporan Hasil Audit pada Satker lingkup mitra kerja Inspektorat	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat I, II, III, IV
			Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan SPIP lingkup mitra kerja Inspektorat	H.5.4.MN.4	Laporan Hasil Pengawasan SPIP yang dihasilkan belum menyentuh Program Strategis	Risiko Operasional	Program Strategis di Kementerian Pertanian belum dapat diketahui risiko-risiko yang	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat I, II, III, IV

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP	Pemilik Risiko	Unit Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sebanyak 24 laporan		Kementerian Pertanian		melekat dalam pencapaiannya			
			Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup mitra kerja Inspektorat sebanyak 2 laporan	H.5.5.MD.1	Tidak terdapat pedoman teknis/ SOP atas pengawasan evaluasi SAKIP	Risiko Operasional	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP secara rinci mengacu pedoman yang dikeluarkan dari Kementerian/ Lembaga lainnya	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat I, II, III, IV
			Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL pada Satker lingkup mitra kerja Inspektorat sebanyak 12 laporan	H.5.6.MD.2	Rekomendasi yang diberikan tumpang tindih dengan pengawasan lainnya khususnya audit	Risiko Operasional	Terjadi double perhitungan rekomendasi untuk rekomendasi yang sejenis pada satker yang sama pada kegiatan pengawasan yang berbeda	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat I, II, III, IV
			Tersusunnya Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	H.5.7.MN.5	Hasil Audit dengan tujuan tertentu terlambat disampaikan dan/atau tidak	Risiko Operasional	Hasil audit dengan tujuan tertentu tidak secara berkala dan menyeluruh	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat Investigasi

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP	Pemilik Risiko	Unit Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sebanyak 60 laporan		secara periodik disampaikan kepada Menteri Pertanian		diketahui oleh Menteri Pertanian	pemerintahan negara		
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian dengan target 95,26 (Nilai)	H.5.8.MN.6	Rendahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Risiko Operasional	- Penurunan Nilai IKPA - Efisiensi dan efektifitas anggaran menurun	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, Sekretariat
				H.5.9.MN.7	Kesalahan dalam melakukan input data keuangan dan pelaporan	Risiko Operasional	- Penilaian IKPA tidak valid - Berisiko menjadi temuan audit	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, Sekretariat
				H.5.10.MN.8	Tidak terjadwalnya / terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa	Risiko Operasional	- Rendahnya serapan anggaran - Menurunnya kepercayaan stakeholder	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara		

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP	Pemilik Risiko	Unit Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pengawasan sebanyak 46 layanan	H.5.11.MN.9	Rekomendasi sulit dipahami dan rekomendasi sulit ditindaklanjuti oleh auditan	Risiko Operasional	Rekomendasi hasil pengawasan tidak atau terlambat ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi (auditan)	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Sekretariat Itjen
			Terkelolanya Manajemen Keuangan sebanyak 12 layanan	H.5.12.MN.10	Pelaksanaan realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana target realisasi	Risiko Operasional	Terjadi deviasi pelaksanaan anggaran	Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal; Sekretariat Itjen

FORMAT 6

ANALISIS RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal
Tahun : 2025

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Level	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Level
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H.5.1.MN.1	Rendahnya komitmen dan partisipasi unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan RB	4 Sering Terjadi	4 Signifikan	19 Tinggi	Ada	- Penetapan target RB dalam PK - Evaluasi berkala atas rencana aksi RB	Memadai	3 Kadang Terjadi	4 Signifikan	17 Tinggi
H.5.2.MN.2	Rendahnya pemahaman pegawai Inspektorat Jenderal terhadap substansi dan urgensi pelaksanaan RB	4 Sering Terjadi	5 Sangat Signifikan	24 Sangat Tinggi	Ada	- Sosialisasi Internal RB	Belum Memadai	3 Kadang Terjadi	5 Sangat Signifikan	22 Sangat Tinggi
H.1.1.MN.1	Ketidaksesuaian antara perencanaan RB dengan	3 Kadang Terjadi	5 Sangat Signifikan	22 Sangat Tinggi	Ada	- Reviu dan sinkronisasi perencanaan RB - Pendampingan unit kerja oleh Tim RB	Memadai	3 Kadang Terjadi	4 Signifikan	17 Tinggi

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Level	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Level
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	implementasi RB oleh seluruh Unit Kerja					- Pelaporan pelaksanaan rencana aksi secara periodik				
H.5.3.MN.3	Laporan Hasil Audit yang disusun bukan diperoleh dari Audit Ketaatan atau Audit Kinerja	3 Kadang Terjadi	1 Tidak Signifikan	4 Sangat Rendah	Ada	Telah diuraikan secara jelas di PKPT Tahun 2025, bahwa pelaksanaan Audit tidak hanya melalui Audit Ketaatan dan Audit Kinerja	Memadai	1 Hampir Tidak Terjadi	1 Tidak Signifikan	4 Sangat Rendah
H.5.4.MN.4	Laporan Hasil Pengawasan SPIP yang dihasilkan belum menyentuh Program Strategis Kementerian Pertanian	3 Kadang Terjadi	3 Minor	10 Rendah	Ada	Telah diuraikan secara jelas di PKPT Tahun 2025, bahwa pelaksanaan Pengawasan SPIP telah merujuk pada Kegiatan Strategis Kementan, selain kegiatan regular yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Mitra	Memadai	1 Hampir Tidak Terjadi	1 Tidak Signifikan	1 Sangat Rendah
H.5.5.MD.1	Tidak terdapat pedoman teknis/ SOP atas pengawasan evaluasi SAKIP	1 Hampir Tidak Terjadi	4 Signifikan	8 Rendah	Ada	Telah disusun Kepmentan Nomor 599/KPTS/HK. 150/M/11/2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Lingkup Kementan, dimana pedoman ini diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal	Memadai	1 Hampir Tidak Terjadi	1 Tidak Signifikan	1 Sangat Rendah

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Level	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Level
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H.5.6.MD.2	Rekomendasi yang diberikan tumpang tindih dengan pengawasan lainnya khususnya audit	3 Kadang Terjadi	3 Moderat	14 Sedang	Ada	Penetapan perhitungan rekomendasi atas hasil pengawasan reviu dihitung berdasarkan kelompok temuan	Memadai	4 Sering Terjadi	4 Signifikan	19 Tinggi
H.5.7.MN.5	Hasil Audit dengan tujuan tertentu terlambat disampaikan dan/atau tidak secara periodik disampaikan kepada Menteri Pertanian	2 Jarang Terjadi	2 Minor	7 Rendah	Ada	Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu selalu disampaikan kepada Menteri Pertanian sesuai dengan pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu	Memadai	3 Kadang Terjadi	3 Moderat	14 Sedang
H.5.8.MN.6	Rendahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran	3 Kadang Terjadi	3 Moderat	14 Sedang	Ada	- Diklat/Bimtek Perencanaan Anggaran - Monitoring realisasi anggaran secara periodik	Memadai	2 Jarang Terjadi	2 Minor	7 Rendah
H.5.9.MN.7	Kesalahan dalam melakukan input data keuangan dan pelaporan	3 Kadang Terjadi	5 Sangat Signifikan	22 Sangat Tinggi	Ada	- Verifikasi berlapis pejabat keuangan - Bimtek/diklat penggunaan SAKTI dan OM SPAN	Memadai	3 Kadang Terjadi	4 Signifikan	17 Tinggi

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Level	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Level
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H.5.10.MN.8	Tidak terjadwal nya / terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa	5 Hampir Pasti Terjadi	4 Signifikan	23 Sangat Tinggi	Ada	- Penjadwalan sejak awal tahun - Penetapan Pejabat Pengadaan di setiap Unit Kerja	Memadai	4 Sering Terjadi	4 Signifikan	19 Tinggi
H.5.11.MN.9	Rekomendasi sulit dipahami dan rekomendasi sulit ditindaklanjuti oleh auditan	3 Kadang Terjadi	3 Moderat	14 Sedang	Ada	- Penyusunan rekomendasi yang spesifik, jelas dan operasional - Komunikasi aktif antara auditor dan auditan - Sosialisasi hasil audit melalui exit meeting - Monitoring tindak lanjut rekomendasi oleh Itjen	Memadai	3 Kadang Terjadi	3 Moderat	14 Sedang
H.5.12.MN.10	Pelaksanaan realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana target realisasi	1 Hampir Tidak Terjadi	3 Moderat	5 Sangat Rendah	Ada	- Penetapan RPD pada Halaman III DIPA - Monitoring realisasi anggaran secara periodik - Koordinasi intensif antara Kelompok Perencanaan dengan Timker Keuangan	Memadai	2 Jarang Terjadi	2 Minor	7 Rendah

FORMAT 7

DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

Nama Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal
 Tahun : 2025
 Selera Risiko Pemilik Risiko : Sedang

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Level Ratio
1	2	3	4	5
H.5.1.MN.1	Rendahnya komitmen dan partisipasi unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan RB	3 Kadang Terjadi	4 Signifikan	17 Tinggi
H.5.2.MN.2	Rendahnya pemahaman pegawai Inspektorat Jenderal terhadap substansi dan urgensi pelaksanaan RB	3 Kadang Terjadi	5 Sangat Signifikan	22 Sangat Tinggi
H.1.1.MN.1	Ketidaksesuaian antara perencanaan RB dengan implementasi RB oleh seluruh Unit Kerja	3 Kadang Terjadi	4 Signifikan	17 Tinggi
H.5.6.MD.2	Rekomendasi yang diberikan tumpang tindih dengan pengawasan lainnya khususnya audit	4 Sering Terjadi	4 Signifikan	19 Tinggi
H.5.9.MN.7	Kesalahan dalam melakukan input data keuangan dan pelaporan	3 Kadang Terjadi	4 Signifikan	17 Tinggi
H.5.10.MN.8	Tidak terjadwal nya / terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa	4 Sering Terjadi	4 Signifikan	19 Tinggi
H.5.11.MN.9	Rekomendasi sulit dipahami dan rekomendasi sulit ditindaklanjuti oleh auditan	3 Kadang Terjadi	3 Moderat	14 Sedang

FORMAT 8

PETA RISIKO

1. Peta Inherent

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23 H.5.10.MN.8	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19 H.5.1.MN.1	24 H.5.2.MN.2
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4 H.5.3.MN.3 H.5.5.MD.1	10 H.5.4.MN.4	14 H.5.6.MD.2 H.5.8.MN.6 H.5.11.MN.9	17	22 H.1.1.MN.1 H.5.9.MN.7
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5 H.5.12.MN.10	8 H.5.5.MD.1	20

2. Peta Residual

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19 H.5.6.MD.2 H.5.10.MN.8	24
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14 H.5.7.MN.5 H.5.11.MN.9	17 H.5.1.MN.1 H.1.1.MN.1 H.5.9.MN.7	22 H.5.2.MN.2
	2	Jarang Terjadi	2	7 H.5.8.MN.6 H.5.12.MN.10	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1 H.5.3.MN.3 H.5.5.MD.1	3	5	8	20

3. Peta After Mitigation Risk

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19 H.5.6.MD.2 H.5.10.MN.8	24
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14 H.5.7.MN.5 H.5.11.MN.9	17 H.5.1.MN.1 H.1.1.MN.1 H.5.9.MN.7	22 H.5.2.MN.2
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

4. Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi 5	20 s.d 25	Merah
Tinggi 4	16 s.d 19	Orange
Sedang 3	12 s.d 15	Kuning
Rendah 2	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah 1	1 s.d 5	Biru

FORMAT 9

ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS)

Nama Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal
Tahun : 2025

Kode	Penyataan Risiko	Why 1	Why 2	Akar Penyebab	Kode Penyebab	Kegiatan Pengendalian
H.5.1.MN.1	Rendahnya komitmen dan partisipasi unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan RB	Kurangnya pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap manfaat pelaksanaan RB sebagai bagian peningkatan tata kelola organisasi	Minimnya integrasi pelaksanaan RB dalam kegiatan harian dan sasaran kinerja unit kerja, sehingga RB dianggap sebagai kewajiban administratif semata.	Kurangnya pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap manfaat pelaksanaan RB	MN.1	- Penetapan target RB dalam PK - Evaluasi berkala atas rencana aksi RB
H.5.2.MN.2	Rendahnya pemahaman pegawai Inspektorat Jenderal terhadap substansi dan urgensi pelaksanaan RB	Sosialisasi internal belum optimal	Kurangnya media komunikasi untuk menjelaskan RB kepada seluruh jenjang pegawai	Sosialisasi internal belum optimal, belum mengena pada tujuan RB, terkadang berbelit	MN.2	Sosialisasi Internal RB
H.1.1.MN.1	Ketidaksesuaian antara perencanaan RB dengan	Rencana aksi RB tidak berbasis konsisi actual, sulit	Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara unit kerja dan tim RB pusat	Gap pemahaman dan eksekusi	MN.3	- Pendampingan unit kerja oleh Tim RB

Kode	Penyataan Risiko	Why 1	Why 2	Akar Penyebab	Kode Penyebab	Kegiatan Pengendalian
	implementasi RB oleh seluruh Unit Kerja	direalisasikan secara operasional				- Pelaporan pelaksanaan rencana aksi secara periodik
H.5.6.MD.2	Rekomendasi yang diberikan tumpang tindih dengan pengawasan lainnya khususnya audit	Pemetaan lintas fungsi pengawasan internal belum terpetakan secara pasti, sehingga antara audit dan revidu yang menyebabkan rekomendasi tidak terintegrasi	Kurangnya forum koordinasi antar unit pengawasan, sehingga rekomendasi tidak terintegrasi	Koordinasi dan pemetaan fungsi pengawasan internal yang kurang	MD.1	Penetapan perhitungan rekomendasi atas hasil pengawasan revidu dihitung berdasarkan kelompok temuan
H.5.9.MN.7	Kesalahan dalam melakukan input data keuangan dan pelaporan	Kurangnya pemahaman teknis petugas keuangan terhadap aplikasi SAKTI dan OM-SPAN	Tidak ada prosedur verifikasi berlapis yang ketat, tidak terdeteksi sebelum dipublikasi	SOP verifikasi belum diimplementasikan secara penuh	MN.5	- Verifikasi berlapis pejabat keuangan - Bimtek/diklat penggunaan SAKTI dan OM SPAN
H.5.10.MN.8	Tidak terjadwal nya / terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa	Perencanaan pengadaan dilakukan oleh Kelompok yang tidak menjalankan proses pengadaan B/J	Petugas / Pejabat Pengadaan B/J tidak focus dan merangkap tugas lain sebagai fungsional prakom	Ketidakjelasan uraian tugas pelaksana pengadaan B/J	MN.6	- Penjadwalan sejak awal tahun - Penetapan Pejabat Pengadaan di setiap Unit Kerja

Kode	Penyataan Risiko	Why 1	Why 2	Akar Penyebab	Kode Penyebab	Kegiatan Pengendalian
H.5.11.MN.9	Rekomendasi sulit dipahami dan rekomendasi sulit ditindaklanjuti oleh auditan	Penyusunan rekomendasi kurang spesifik dan tidak kontekstual, sehingga auditan kesulitan menterjemahkan dalam TL nyata	Pembahasan atau komunikasi pada saat penyampaian hasil pengawasan, kurang/ terburu-buru bahkan tidak dilaksanakan	Pembubuhan kalimat rekomendasi kurang spesifik, waktu pembahasan hasil pengawasan minim	MN.7	- Penyusunan rekomendasi yang spesifik, jelas dan operasional - Komunikasi aktif antara auditor dan auditan - Sosialisasi hasil audit melalui exit meeting - Monitoring tindak lanjut rekomendasi oleh Itjen

FORMAT 10

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal
Tahun : 2025

Kode	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Unsur SPIP	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu				Risiko yang Direspon		
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MN.1	Rendahnya komitmen dan partisipasi unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan RB	Mengurangi dampak	Kurangnya pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap manfaat pelaksanaan RB	- Penetapan target RB dalam PK - Evaluasi berkala atas rencana aksi RB	Lingkungan Pengendalian Penegakan integritas dan nilai etika	Inspektur Jenderal	Dokumen					4 Sering Terjadi	4 Signifikan	19 Tinggi
MN.2	Rendahnya pemahaman pegawai Inspektorat Jenderal terhadap	Mengurangi dampak	Sosialisasi internal belum optimal, belum mengena pada tujuan RB, terkadang berbelit	Sosialisasi Internal RB	Kegiatan pengendalian Pembinaan SDM	Inspektur Jenderal	Dokumen					4 Sering Terjadi	5 Sangat Signifikan	24 Sangat Tinggi

Kode	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Unsur SPIP	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu				Risiko yang Direspon		
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	substansi dan urgensi pelaksanaan RB													
MN.3	Ketidaksesuaian antara perencanaan RB dengan implementasi RB oleh seluruh Unit Kerja	Mengurangi dampak	Gap pemahaman dan eksekusi	- Pendampingan unit kerja oleh Tim RB - Pelaporan pelaksanaan rencana aksi secara periodik	Penilaian Risiko Identifikasi Risiko	Inspektur Jenderal	Dokumen					3 Kadang Terjadi	5 Sangat Signifikan	22 Sangat Tinggi
MD.1	Rekomendasi yang diberikan tumpang tindih dengan pengawasan lainnya khususnya audit	Mengurangi dampak	Koordinasi dan pemetaan fungsi pengawasan internal yang kurang	Penetapan perhitungan rekomendasi atas hasil pengawasan revidi dihitung berdasarkan kelompok temuan	Lingkungan Pengendalian Perwujudan peran APIP	Inspektur Jenderal	Dokumen					3 Kadang Terjadi	3 Moderat	14 Sedang

Kode	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Unsur SPIP	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu				Risiko yang Direspon		
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MN.5	Kesalahan dalam melakukan input data keuangan dan pelaporan	Mengurangi dampak	SOP verifikasi belum diimplementasikan secara penuh	- Verifikasi berlapis pejabat keuangan - Bimtek/diklat penggunaan SAKTI dan OM SPAN	Kegiatan Pengendalian Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting	Inspektur Jenderal	Dokumen					3 Kadang Terjadi	5 Sangat Signifikan	22 Sangat Tinggi
MN.6	Tidak terjadwal nya / terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa	Mengurangi dampak	Ketidakjelasan uraian tugas pelaksana pengadaan B/J	- Penjadwalan sejak awal tahun - Penetapan Pejabat Pengadaan di setiap Unit Kerja	Penilaian Risiko Identifikasi Risiko	Inspektur Jenderal	Dokumen					5 Hampir Pasti Terjadi	4 Signifikan	23 Sangat Tinggi
MN.7	Rekomendasi sulit dipahami dan rekomendasi sulit	Mengurangi dampak	Pembubuhan kalimat rekomendasi kurang spesifik, waktu	- Penyusunan rekomendasi yang spesifik,	Lingkungan Pengendalian	Inspektur Jenderal	Dokumen					3 Kadang Terjadi	3 Moderat	14 Sedang

Kode	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Unsur SPIP	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu				Risiko yang Direspon		
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ditindaklanjuti oleh auditan		pembahasan hasil pengawasan minim	jelas dan operasional - Komunikasi aktif antara auditor dan auditan - Sosialisasi hasil audit melalui exit meeting - Monitoring tindak lanjut rekomendasi oleh Itjen	Perwujudan peran APIP									